

Logo
kementerian

Kop Surat
Nama Instansi, alamat, dan kontak

KEPUTUSAN KEPALA {satker} (1)

NOMOR : KEP-..... (2)

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA
{satker} (3)**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN {satker} (4)

- Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja..... (5)
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- e. (6)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala {satker} (7) Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor {satker} (8) Tahun Anggaran {tahun} (9).

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor {satker} (10).
- Kedua : (11).
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (12)

Pada Tanggal : (13)

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (14)

..... (15)

NIP (16)

PENETAPAN
USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
{satker} (20)
TAHUN ANGGARAN {tahun} (21)

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1	Kepala KPP	SATKER_KPA, SATKER_APPROVER_ASET, SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN	KPA & KPB
2		SATKER_PPK, SATKER_VALIDATOR_ASET	PPK
3		SATKER_PPSPM	PPSPM
4		SATKER_ADMIN	ADMIN
5		SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN, SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR KOMITMEN, SATKER_OPERATOR ANGGARAN, SATKER_OPERATOR PELAPORAN, SATKER_OPERATOR PIUTANG	Bendahara Pengeluaran
6		SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR KOMITMEN, SATKER_OPERATOR ANGGARAN	Operator SPM
7		SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN, SATKER_OPERATOR KOMITMEN	Operator SPM-KP
8		SATKER_OPERATOR_ASET, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN	Operator SIMAK & Persediaan KPP
9		SATKER_OPERATOR PELAPORAN, SATKER_OPERATOR PIUTANG	Operator SAIBA KPP
10		SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN PEMBANTU, SATKER_APPROVER_ASET PEMBANTU	Kepala KP2KP
11		SATKER_VALIDATOR_ASET PEMBANTU	Validator Aset KP2KP
12		SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN PEMBA NTU, SATKER_OPERATOR KOMITMEN, SATKER_OPERATOR PIUTANG, SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN PEMBANTU, SATKER_OPERATOR_ASET PEMBANTU	BPP pada KP2KP
13		SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN PEMBANTU, SATKER_OPERATOR_ASET PEMBANTU	Operator SIMAK & Persediaan pada KP2KP (jika ada)

**) User sesama Operator dapat digabung*

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (22),

..... (23)

NIP (24)

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR MENGENAI PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

NO	URAIAN ISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait

11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2017 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan